



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE JAYAPURA

LATAR BELAKANG

Perawat RSUD Jayapura sebagai bagian daripada pelayan kesehatan untuk masyarakat Jayapura dan sekitarnya, berperan penting untuk kesuksesan pemerintah Provinsi Papua dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat di kota Jayapura khususnya dan Papua pada umumnya. Di lain pihak para perawat tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal pembinaan dari pemda setempat agar pelayanan para perawat tersebut semakin meningkat dan dapat di rasakan masyarakat secara layak. Salah satu komitmen pemda yang tidak terkomunikasi dengan baik dengan para perawat tersebut adalah tidak tersosialisasinya insentif pemda kepada para perawat tersebut yang sebelumnya, pernah dijanjikan pemda sesuai surat keputusan Gubernur Papua No. 125 tentang insentif bagi para perawat. Realisasi insentif sudah terealisasi pada perawat RS Abepura, namun RS Dok II Jayapura tidak direalisasikan dengan alasan pemda bahwa bertentangan dengan peraturan.

Dengan hal diatas maka para perawat pada tanggal 1 Maret 2011 mengadakan demo damai di kantor DPRD, pada tanggal 2 Maret 2011 mengadakan demo damai di kantor Gubernur dan berlanjut tanggal 3 Maret 2011 di kantor Gubernur. Namun Gubernur tidak menerima atau tidak ingin menemui mereka. Akibat daripada demo tersebut pemda menuduh para perawat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melalaikan tugasnya sehingga tidak terlayannya pasien-pasien yang perlu mendapat perawatan/layanan dari para perawat. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Maret 2011 Polda menangkap/menahan 5 orang perawat yang dianggap mereka menggerakkan demo tersebut dengan memproses secara hukum

PERTEMUAN PIHAK TERKAIT

Tanggal : 22 Maret 2011
Waktu : 14.00 WIT
Tempat : Ruang ASTON Hotel Jayapura

Peserta :

- A. Pemda Papua yang diwakili oleh SEKDA
- B. Pihak RS DOK II Jayapura yang diwakili Direktur dan Jajarannya
- C. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua
- D. Komisi E DPRD Papua (2 orang)
- E. Komisi IX DPR RI (bpk. Jamaluddin Jafar, SH dan bpk. H. Mamat R Abdullah)

Hasil :

1. Pihak RS DOK II akan mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan para perawat
2. Walaupun ada aksi demo yang diadakan oleh para perawat, pelayanan kesehatan tetap berlangsung
3. SK Gubernur No. 125 tentang insentif tersebut disadari akan melanggar aturan apabila dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak pemda akan mencari formulasi yang tidak menyalahi aturan untuk memberikan insentif sesuai dengan kemampuan anggaran dari pemda
4. Pihak perawat diminta untuk meningkatkan kinerjanya yang selama ini dianggap masih buruk/kurang pelayanannya terhadap masyarakat
5. Pihak perawat meminta agar perawat yang ditahan sebanyak 5 orang agar dibebaskan atau di tangguhkan penahanannya dari Polda Papua
6. Pada tanggal 25 Maret 2011 : pihak DPR (bpk. Jamaluddin Jafar, SH) di dampingi pihak DPRD (H. Maddu Malu) bertemu dengan pihak Polda yang di wakili oleh Wakapolda dan Ka reskrim, untuk menyampaikan bahwa para perawat menginginkan para kawan-kawannya yang ditahan supaya di lepas tanpa syarat karena apa yang dilakukan di jamin oleh UUD Negara tahun 1945, serta demo yang mereka lakukan itu telah mendapat ijin dari pihak Polres Jayapura. Pihak Polda berjanji akan berkomunikasi dengan Gubernur Papua agar langkah-langkah yang akan diambil tidak saling merugikan semua pihak terutama pihak pasien

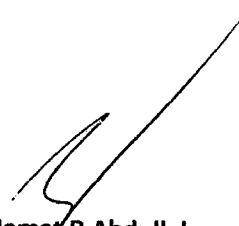
Demikian laporan singkat ini kami buat untuk dimaklumi.

Jakarta 28 Maret 2011

Team



Jamaluddin Jafar, SH
Anggota DPR RI No. 146



H. Mamat R Abdullah
Anggota DPR RI No. 202